



SEPULUH AGENDA POLITIK PEREMPUAN TAHUN 2014-2019

Dina Martiany*)

Abstrak

Dengan ditetapkannya presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014 lalu, maka dimulailah babak baru pemerintahan Indonesia. Seluruh rakyat berharap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bangsa akan berlangsung lebih baik dan tepat sasaran. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah program kerja yang berperspektif gender, sebagaimana yang diusulkan Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam dalam "10 Agenda Politik Perempuan". Butir-butir agenda yang dideklarasikan pada 7 Maret 2014 lalu ditujukan bagi terpenuhinya hak-hak perempuan terpenuhi dan kesetaraan gender.

Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Presiden Republik Indonesia hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 yang lalu. Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden R.I. ke-7 dan H.M. Jusuf Kalla (JK), sebagai Wakil Presiden (Wapres). Beberapa bulan sebelumnya, KPU juga telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), yang diselenggarakan pada 5 April 2014. Indonesia akan memasuki periode baru pemerintahan nasional baik di jajaran eksekutif maupun legislatif.

Sebagaimana biasanya, suksesi selalu memberikan harapan baru. Seluruh rakyat mengharapkan pemerintahan baru dapat membawa perubahan signifikan, dalam pelaksanaan pembangunan bangsa. Harapan yang sama disampaikan pula oleh kelompok aktivis perempuan, yang berharap agar pemerintahan baru lebih peduli terhadap isu perempuan. Hasil Survei Demografi dan Kependudukan Indonesia (SDKI) Tahun 2012 menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan mengalami peningkatan dari 228/100.000 kelahiran hidup menjadi 359/100.000 kelahiran hidup. Permasalahan lainnya, yaitu: adanya 342 kebijakan di tingkat nasional dan lokal

*) Peneliti Muda Studi Gender pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Setjen DPR-RI. E-mail: dina8333@gmail.com.



yang terbukti mendiskriminasi perempuan dan anak perempuan dengan basis moralitas; meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, baik bersifat seksual, fisik maupun ekonomi; tingginya angka buta huruf dan putus sekolah, yang terutama dialami oleh perempuan pedesaan; rendahnya akses terhadap pekerjaan yang layak; meningkatnya jumlah perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT), baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang menjadi korban eksploitasi; dan meningkatnya jumlah kasus dan modus kejahatan perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*).

Data di atas menunjukkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan dan perlindungan perempuan. Selama ini, isu perempuan seringkali dipinggirkan atau disubordinasikan, jika dibandingkan dengan isu politik, ekonomi, pertahanan keamanan, energi, dan isu mayoritas lainnya. Padahal, kualitas hidup suatu bangsa ikut ditentukan pula oleh kualitas hidup perempuan. Isu perempuan tidak bisa hanya dijadikan isu pelengkap, tetapi harus menjadi *mainstream* dalam berbagai bidang pembangunan. Hal ini sangat penting, mengingat masih banyak terjadi permasalahan dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender

Sepuluh Agenda Politik Perempuan

Sebagai salah satu upaya untuk mendorong keberpihakan pemerintah dan lembaga legislatif baru terhadap permasalahan perempuan, 60 kelompok/organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan di luar pemerintahan menginisiasi terbentuknya “Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam”. Tergabung di dalamnya antara lain Koalisi Perempuan Indonesia, AMAN (*The Asian Muslim Action Network*) Indonesia, Migrant CARE, Institute Kapal Perempuan, Solidaritas Perempuan, Kalyanamitra, *Our Voice*, *Institute Global Justice*, Perempuan Mahardhika, LBH Jakarta, dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam merupakan representasi berbagai kelompok perempuan yang ingin berpartisipasi dalam membangun peradaban Indonesia yang bersih dari korupsi, bebas dari kemiskinan, bebas dari segala bentuk kekerasan dan rasa takut, dan demi mencapai keadilan dan kedaulatan bagi rakyat miskin, perempuan serta kelompok

marjinal. Pada peringatan Hari Perempuan Internasional 7 Maret 2014 lalu, gerakan ini mendeklarasikan “10 Agenda Politik Perempuan” yang ditujukan untuk presiden-wapres dan kabinetnya, serta lembaga legislatif periode 2014-2019.

Permasalahan dan usulan agenda terkandung dalam 10 Agenda Politik Perempuan, yaitu: (1) pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksualitas (HIV/AIDS, AKI, sunat perempuan, perkawinan anak); (2) pemenuhan hak atas pendidikan; (3) penghentian kekerasan terhadap perempuan (kekerasan seksual, kekerasan berbasis struktural, berbasis agama, *trafficking*); (4) penghentian pemiskinan perempuan dan kelompok marjinal (perempuan perbatasan, terpencil dan disabilitas) melalui perlindungan sosial; (5) perlindungan perempuan dalam situasi konflik, bencana serta pengelolaan lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA); (6) pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi perempuan (perlindungan buruh migran, PRT, PRT migran, sektor informal, buruh perempuan); (7) perlindungan atas kebebasan berkeyakinan dan beragama; (8) hak politik perempuan (hak berorganisasi, partisipasi pengambilan keputusan, kewarganegaraan); (9) penghapusan produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas; dan (10) penghentian korupsi.

Kelompok perempuan mengharapkan agar “10 Agenda Politik Perempuan” dapat menjadi suatu *Common Platform* seluruh gerakan perempuan. *Platform* ini akan disampaikan kepada partai-partai politik, presiden-wapres dan kabinetnya; serta anggota lembaga legislatif di seluruh tingkatan yang nantinya akan dapat menjadi landasan pembangunan pemerintahan baru.

Berharap pada Pemerintah dan Lembaga Legislatif

Adanya harapan isu perempuan menjadi bagian program pemerintahan terlihat menjanjikan karena sejak masa kampanye Jokowi-JK telah memaparkan visi-misi dan berbagai program yang mengusung isu perempuan. Jokowi-JK menguraikan isu perempuan dalam penjabaran visinya yang dikemas pada bagian “Berdaulat Dalam Bidang Politik”, yaitu dalam poin 10 yang menyatakan

komitmen untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dalam politik dan pembangunan. Jokowi-JK akan menekankan pemberdayaan perempuan pada tujuh prioritas utama, yaitu: 1) memperjuangkan kesetaraan dan menolak diskriminasi terhadap kelompok atau golongan tertentu; 2) akan membuat kebijakan tindakan khusus sementara terhadap kelompok marjinal, termasuk kelompok perempuan; 3) berkomitmen memperjuangkan pemenuhan kuota 30% tidak sekedar angka, tetapi agar semua parpol mempersiapkan kader perempuan yang mumpuni melalui perekrutan, pendidikan politik, kaderisasi, dan memberi akses serta kesempatan yang sama. Termasuk tindakan khusus di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; 4) akan memperjuangkan kebijakan khusus untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, serta menyediakan jaminan persalinan gratis. Mengalokasikan 5% anggaran negara untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), angka kematian bayi dan balita, pengendalian HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya; 5) menyelenggarakan pendidikan 12 tahun yang berkualitas dan tanpa biaya, dan menerapkan nilai kesetaraan gender; 6) mengefektifkan pelaksanaan semua UU untuk penghentian kekerasan perempuan; dan 7) inisiasi UU dan perlindungan PRT dan pekerja/buruh migran, di dalam dan luar negeri.

Para aktivis perempuan memiliki komentar yang beragam terhadap visi-misi Jokowi-JK. Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Perempuan dan Demokrasi (Perludem), menganggap isu perempuan tidak menjadi tekanan utama dalam Pilpres 2014 ini, termasuk dalam visi-misi Jokowi-JK. Isu perempuan hanya sebagai pelengkap dari isu-isu sentral yang selama ini dianggap lebih penting, seperti: ekonomi, hukum, dan politik. Sementara itu, pimpinan redaksi Jurnal *Perempuan*, Dewi Candraningrum, menjelaskan pentingnya agar partisipasi politik tidak hanya sekedar deskriptif tetapi juga substantif. Perlu adanya pendidikan politik bagi, oleh, dan untuk perempuan. Bagaimana pun, kelompok perempuan, mengharapkan presiden terpilih akan mampu mengemban amanat adil, adil gender, adil kepada difabel, dan adil kepada para kelompok marjinal.

Apabila dicermati, 6 dari 10 butir Agenda Politik Perempuan telah terakomodir

dalam Visi-Misi Jokowi-JK. Adapun butir-butir yang belum termasuk dalam visi-misi, antara lain tentang penghentian pemiskinan dan perlindungan sosial bagi perempuan di perbatasan, terpencil, disabilitas; dan perlindungan perempuan dalam situasi konflik, bencana, serta pengelolaan lingkungan dan SDA. Oleh karena itu, dalam perumusan perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya kelak, Pemerintahan Jokowi-JK harus mengelaborasi lebih mendalam isu-isu perempuan yang belum terakomodir. Pemerintahan ini diharapkan dapat mengintegrasikan prinsip pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan ke depan.

Selain pada pemerintah, “10 Agenda Politik Perempuan” juga disampaikan kepada anggota legislatif, baik DPR-RI maupun di DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, terutama yang perempuan. Dengan adanya dorongan ini diharapkan perempuan anggota legislatif terpilih lebih memiliki keberpihakan pada isu perempuan.

Secara kuantitas, persentase keterwakilan perempuan DPR-RI Periode 2014-2019 mengalami penurunan, yaitu menjadi sekitar 17% atau 97 orang perempuan, dari total 560 Anggota DPR-RI. Pada tahun 2009-2014, persentase keterwakilan perempuan mencapai 18% atau sebanyak 103 orang. Meskipun demikian, gerakan perempuan masih menaruh harapan dapat terjadinya peningkatan keterwakilan perempuan secara kualitas atau substantif.

Lovenduski menyebutkan bahwa representasi perempuan memiliki paras ganda, yaitu sebagai representasi deskriptif dan substantif. Pada representasi deskriptif, diasumsikan bahwa hanya perempuan yang mampu mewakili kepentingan perempuan, sehingga seharusnya kuantitas perempuan di legislatif, sebanding dengan isu perempuan yang diperjuangkan. Secara substantif, keterwakilan perempuan secara kuantitas tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas perjuangan isu perempuan. Keterwakilan substantif ini hanya fokus pada pentingnya ide dan tujuan mengusung isu perempuan. Dengan kata lain, Anggota DPR-RI perempuan dan laki-laki, sama-sama dapat memiliki kepedulian terhadap isu perempuan. Ironisnya, meskipun berjenis kelamin perempuan, tidak semua legislator perempuan akan lebih memiliki kepedulian

terhadap isu perempuan. Perilaku, kesadaran, dan kemampuan untuk mewakili kepentingan perempuan tidak hanya karena semata-mata faktor jenis kelamin tetapi juga karena pengalaman individu. Mewujudkan keterwakilan substantif inilah yang akan menjadi tantangan penting bagi para Anggota DPR-RI periode 2014-2019 mendatang.

Penutup

“10 Agenda Politik Perempuan” yang diusulkan kepada presiden-wapres terpilih, beserta kabinetnya, serta lembaga legislatif, harus direspons dengan serius sebagai sebuah *Common Platform*. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa isu perempuan hendaknya tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam berbagai bidang pembangunan secara multisektoral. Hal ini disebabkan karena setiap bidang pembangunan terkait dengan isu perempuan. Dengan demikian, peran perempuan sebagai salah satu komponen penggerak pembangunan bangsa dapat dilaksanakan secara optimal.

Perempuan adalah subjek dalam pembangunan bangsa Indonesia, yang harus diberikan akses, kesempatan, kontrol, dan partisipasi yang sama dalam pembangunan, serta dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Terintegrasinya isu perempuan dalam berbagai bidang pembangunan diharapkan dapat terwujud pada periode Pemerintahan mendatang, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif periode 2014-2019 di semua tingkatan, untuk mencapai pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Referensi

- Diani, Hera. "Isu Perempuan Hanya Pelengkap Dalam Pilpres", <http://www.magdalene.co/news-193-isu-perempuan-hanya-pelengkap-dalam-pilpres.html>, diakses tanggal 15 Juli 2014.
- "Ini 97 Perempuan Anggota DPR Periode 2014-2019". Berita dalam situs <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/2159364/ini.97.Perempuan.Anggota.DPR.Periode.2014-2019>, diakses tanggal 22 Juli 2014.
- "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian: Visi, Misi, dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014", http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf, diakses tanggal 16 Juli 2014.
- Laporan Kegiatan Deklarasi 10 Agenda Politik Perempuan: Peringatan Hari Perempuan Internasional 7 Maret 2014. 2014. http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/07/LAPORAN-KEGIATAN.ke-TIM-INTI-Final.final_.pdf, diakses tanggal 21 Juli 2014.
- Lovenduski, Joni. 2008. *Politik Berparas Perempuan*. Jakarta: Kanisius.
- Squires, Judith. 2000. *Gender in Political Theory*. USA: Polity Press in association with Blackwell Publishers. Ltd.